

MERENUNGGAN KEMBALI PANCASILA DAN KEINDONESIAAN KITA

by Zuli Qodir

Submission date: 09-Aug-2019 08:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 1158737348

File name: B._16_Zuly_Qodir.pdf (5.78M)

Word count: 5812

Character count: 38439

MERENUNGAN KEMBALI PANCASILA DAN KEINDONESIAAN KITA

Zuly Qodir

Saya akan memulai tulisan ini dengan pidato Soekarno di depan Sidang PBB tanggal 30 September tahun 1960, begini :
“Maafkan, Lord Russell. Saya kira tuan melupakan adanya lebih daripada seribu juta rakyat, rakyat Asia dan Afrika, dan mungkin pula rakyat-rakyat Latin Amerika, yang tidak menganut ajaran Manifesto Komunis atau pun Declaration of Independence”. Dari pengalaman Kami sendiri dan dari sejarah kami sendiri tumbuhlah sesuatu yang lain, sesuatu yang jauh lebih sesuai, sesuatu yang jauh lebih cocok. Sesuatu itu kami namakan Pancasila. Gagasan dan cita-cita itu, sudah terkandung dalam bangsa Kami. Telah timbul dalam bangsa kami dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional”. (Soekarno, seperti dikutipkan Adhjat K Mihardja, 2005)

“Nasionalisme yang sejati, nasionalismenya itu bukan semata-mata foto copie atas tiruan dari Nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan”. [Di bawah Bendera revolusi, hlm. 5]

“Apakah Kelemahan kita: Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong” (Pidato HUT Proklamasi, 1966 Bung Karno)

“Ini dadaku, mana dadamu? Kalau Malaysia mau konfrontasi ekonomi, Kita hadapi dengan konfrontasi ekonomi. Kalau Malaysia

mau konfrontasi politik, Kita hadapi dengan konfrontasi politik. Kalau Malaysia mau konfrontasi militer Kita hadapi dengan konfrontasi militer". (Bung Karno)

Kutipan pidato diatas sengaja saya tampilkan untuk menunjukkan bahwa Bung Karno bisa menjadi ilham untuk masa depan Bangsa dan Para petinggi bangsa ini, termasuk para petinggi partai politik dan elit agama yang seringkali "keblinger" dengan kondisi zamannya. Saatnya kita renungkan kembali kebangsaan dan kelIndonesiaan kita.

Pertarungan politik KeIndonesiaan

Ada tarik-menarik yang kuat antara kubu nasionalis versus Islamis, ketika bangsa ini hendak diproklamirkan. Pancasila sebagai dasar Negara ataukah Islam. Pilihan akhirnya jatuh pada Pancasila sebagai dasar Negara, bukan Islam. Tetapi perdebatan tentang Islam sebagai dasar Negara sampai sekarang tidak pernah padam. Pengikutnya sedikit tetapi berpengaruh di tengah muslim Indonesia bahkan muslim internasional.

Sampai tahun 2009 bahkan sampai sekarang 2013, kelompok kecil dalam Islam Indonesia masih berkehendak menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Dukungannya tidak kuat karena hanya mencapai 8,7 % yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dengan jumlah penduduk muslim mencapai 88,57 % total penduduk Indonesia tahun 2005, 215 juta jiwa. Tahun 2012 penduduk Indonesia mencapai 240 juta. Tahun 2015 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 254 juta dan sekarang diperkirakan mencapai 260 juta jiwa. Sebuah bangsa yang besar dari segi penduduk dan luas wilayah. Agama kita pun sangat beragam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Islam, Khonghucu dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa telah diakui secara yuridis formal tahun 2016. Tetapi ketika memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa apakah Pancasila sesuai dengan prinsip demokrasi, umat muslim Indonesia 87,3% mendukungnya.

Dari data yang ada, sebenarnya antara Pancasila dengan Islam

tidak serta merta dipersoalkan di Indonesia, terutama oleh mayoritas. Tetapi dalam perjalanannya terdapat "riak-riak kecil" yang tetap menghendaki Islam sebagai dasar Negara atau sekurang-kurangnya Perda Syariah menjadi bagian inheren dalam Negara Pancasila. Hal ini dapat diperhatikan sampai tahun 2009 telah muncul lebih dari 89 perda syariah yang beredar di Indonesia yang berkisar di masalah moralitas, seperti Perda Jilbab, Perda Zakat, Perda miras, Perda Pelacuran dan Perda khalwat.

Oleh sebab masyarakat muslim Indonesia (jumlah mayoritas) maka memperbincangkan antara Islam dan Pancasila dan kelIndonesiaan menjadi penting dipertimbangkan. Hal ini tentu saja diharapkan menjadi diskusi yang sehat dan kondusif, sehingga membuahkan pikiran-pikiran yang segar untuk kemajuan bangsa ini yang tengah terpuruk dengan banyaknya penyakit social yang bernama kemungkaran social. Beberapa kemungkaran social seperti korupsi, ketidakadilan hukum, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik merupakan hal yang mestinya direspon segera oleh umat beragama.

Kritik-kritik dan ketegangan antara kelompok Islam versus nasionalis dapat dikatakan terus berlangsung hingga kini dalam intensitas yang beragam. Pada tiap Pemilu pasca reformasi adalah salah satu puncak ketegangan kelompok nasionalis versus Islamist sehingga dalam tiga Pemilu muncul partai-partai berideologi non Pancasila (baca: Ideologi Islam) turut dalam Pemilu. Namun hal yang menarik sebenarnya adalah, bahwa partai-partai berideologi Islam sejak Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 senantiasa mengalami kekalahan dalam hal perolehan suara, hanya mencapai 37,7 % jumlah pemilih Indonesia yang mencapai 180 juta. Sementara pada Pemilu 2014 pun partai-partai Islam mengalami kekalahan dari partai non keagamaan seperti Partai Golkar, PDIP, Hanura, Partai Nasdem, Gerindra, PKPI. Sementara partai yang secara tegas mengusung ideology keagamaan (Islam) PKS, dan PPP bahkan PBB tidak lolos *electoral threshold* 2,5 %. Sementara PKB dan PAN, sekalipun menjadi partai dengan basis keislaman NU dan Muhammadiyah memilih sebagai partai non keislaman. Namun suara Islamist tetap muncul dan

tampaknya berharap suara Islam menjadi basis dari partai-partai Islam.

Belakangan bahkan partai-partai peserta Pilkada dapat dikatakan tidak ada lagi yang berbasiskan ideology sebagaimana pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia yakni khususnya Pemilu tahun 1955 dimana ada partai keislaman seperti Masyumi, Sarekat Islam. Terdapat pula partai Nasionalis yakni PNI, serta partai Kristen Parkindo dan partai aliran kiri yakni PKI. Sangat jelas ideology yang diusung. Namun yang menarik diantara para tokohnya tetap dapat berdialog, berkomunikasi dan kerjasama sebagai sesama anak bangsa membangun bangsa. Sedangkan saat ini tampaknya para elit partai hanya mendasarkan pada kepentingan sesaat yakni kekuasaan politik untuk dapat berkoalisi. Ideology yang dibangun adalah ideology kekuasaan bukan ideology yang membedakan mana partai keagamaan dan non keagamaan, bahkan mengembangkan kebencian dan hasutan pada sesama anak-anak bangsa sebagai pemilih. Sangat jelas yang membedakan antara elit politik era awal kemerdekaan sampai tahun 1955 dengan saat ini. Ketegasan ideologis hanya dapat dilihat saat membangun kebencian dan rebutan kekuasaan politik dan ekonomi.

Dalam konteks kebangsaan yang tengah terpuruk itulah, tulisan ini hendak memberikan catatan-catatan tentang hubungan agama dan Negara dalam struktur Negara Pancasila sebagai ideology berbangsa yang telah berjalan selama 73 tahun, mengapa seringkali mendapatkan kritik keras dari kelompok "islamist" yang berkehendak menjadikan Islam sebagai dasar Negara dan bagaimana praktek demokrasi Pancasila berlangsung. Ulasan dalam tulisan ini tentu sepintas-sepintas namun diharapkan memberikan gambaran tentang pentingnya Pancasila sebagai ideology berbangsa dan bernegara dipraktikkan sehingga demokrasi yang diharapkan sesuai dengan keinginan banyak pihak tidak hanya segelitir orang.

Ideologi Pancasila dan Partai Politik

Sebagai dasar Negara, Pancasila telah teruji selama tujuh puluh tiga tahun kemerdekaan, sekalipun belum sempurna dalam

pelaksanaan. Pancasila dalam kadar tertentu dapat dikatakan tahan banting. Hal ini bukan karena Pancasila berbunyi sendiri, tetapi sebagai Ideologi Pancasila memang memiliki nilai yang dapat diperjuangkan dan dianut sebagai paham yang harusnya dicapai oleh sebuah bangsa. Pancasila sebagai ideology merupakan ideology terbuka, karena itu siapa pun boleh menafsirkan, hanya beberapa tahu lamanya tafsir hanya boleh dilakukan oleh rezim kekuasaan politik. Di luar rezim tidak ada tafsir alternative, Pancasila akhirnya menjadi ideology tertutup dan terjadi rezimintasi tafsir. Pancasila dapat kita katakan sebagai perekat, pengikat dan landasan untuk menuju kemajuan bangsa dan negara. Tentu bukan tanpa riak-riak yang mengganggunya.

Pancasila sebenarnya merupakan ideology murni yang luhur dan harus diperjuangkan. Ideology murni Pancasila tertuang dalam pembukaannya, yakni menghargai keragaman, mencerdaskan bangsa dan memakmurkan bangsa Indonesia dalam landasan kemerdekaan. Merdeka dari rasa takut (terorisme, begal, pengrusakan dan pencurian), serta merdeka dari kekurangan dan kemiskinan, karena Pancasila mengamanatkan adanya kesejahteraan untuk bangsa Indonesia, serta merdeka dari tidak dapat mengenyam pendidikan dasar karena Pancasila mengamanatkan untuk mencerdaskan Bangsa. Pancasila merupakan ideology yang telah hidup dan berjalan ditengah masyarakat sejak sebelum kemerdekaan berlangsung di Indonesia. Kita ingat pidato Soekarno di depan Sidang PBB seperti saya kutipkan diawal tulisan ini. Pancasila bukan barang asing bangsa Indonesia yang ketika sebelum merdeka disebut sebagai Nusantara-Hindia Belanda dan seterusnya.

Gagasan ideologis Pancasila yang demikian luhur tersebut sebenarnya telah tertanam dalam sejarah bangsa ini. Pancasila terlahir dari khazanah masa lampau yang dalam prakteknya sebenarnya dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sekalipun tidak memahami sisi filosofis dan mungkin juga rigid prakteknya, tetapi masyarakat mempraktekkan. Berbeda dengan para politisi yang belakangan tampak lebih mementingkan diri dan kelompoknya sehingga tidak memberikan cerminan atas filosofi dan nilai-nilai dasar Pancasila. Praktis hidup politisi bertabrakan. Disinilah

kritik atas ideology murni Pancasila mendapatkan relevansinya. Praktek berbangsa dan bernegara seringkali bertabrakan dengan gagasan ideology murni Pancasila yang luhur. Ideology murni Pancasila seringkali hanya berjalan dalam retorika politik, tetapi tidak teraktualkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Jika saat ini kita perhatikan dalam dunia politik Indonesia, maka dengan terang benderang dapat dikatakan bahwa partai politik yang berasaskan Pancasila dan yang berasaskan Islam sama-sama berjalan nyaris sempurna ngangkangi Ideologi murni Pancasila. Partai-partai politik sibuk dengan urusannya sendiri tanpa secara sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang menjadi amanat ideology Pancasila. Partai politik sibuk dengan agenda politiknya untuk kemenangan pada pemilu berikutnya. Partai politik sibuk dengan bagaimana memenangkan calon-calon kepala daerah tingkat satu atau tingkat dua dalam Pemilu (Pilkada), sehingga nyaris sempurna dalam meninggalkan amanat ideology Pancasila. Bahkan, partai politik secara semena-mena ada yang hendak merubah dan mengganti dasar Negara Indonesia, dari Pancasila menjadi yang lainnya dengan alasan bahwa Pancasila adalah buatan manusia dan perlu ditafsir ulang dan dikaji serta memberikan kesempatan pada ideology lain sebagai dasar negara di Indonesia.

Partai politik akan tampak sibuk dengan gagasan ekonomi Pancasila, gagasan mencerdaskan bangsa, menghargai keragaman dan menjunjung kemerdekaan pada saat Pemilu tiba, tetapi selepas Pemilu, partai politik nasionalis dan Islam kembali lagi pada agenda utamanya yakni mengurus partainya dan dirinya untuk kemenangan pada Pemilu berikutnya. Disinilah kritik pada partai politik layak ditempatkan sebab partai itulah yang paling berkepentingan dengan Pancasila sehingga ideology murni Pancasila benar-benar dapat menjadi pijakan dalam membangun sebuah bangsa dan peradabannya. Partai politik serta kelompok anak-anak bangsa yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar ideology berbangsa dan bernegara yang lain pantas dipertanyakan dimensi keIndonesiaan dan kebangsaannya sebab Pancasila merupakan kesepakatan bersama elemen bangsa sebelum negara ini merdeka.

Bahkan Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam besar di Indonesia telah resmi mendukung Negara Pancasila sebagai bentuk negara yang final dengan dictum Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah*, negara kesaksian bersama yang harus diisi secara bersama-sama oleh siapapun. Mengingkari kesepakatan bersama atas Pancasila sama dengan membubarkan kesepakatan para pendiri bangsa yang terdiri dari para ulama-umara, para tokoh nasionalis kebangsaan Tionghoa, Arab, Jawa, Sumatra, Celebes (Sulawesi), Ambon, Bali dan seterusnya. Inilah dasar negara yang telah disepakati bersama dan menjadi hasil ijtihad para ulama Muhammadiyah dan NU yang ketika itu turut bersidang merumuskan dasar negara Indonesia.

Dalam proses sejarah bangsa ini, Pancasila telah terbukti menjadi perekat seluruh komponen bangsa yang sangat beragam, dari Papua sampai Aceh. Dari keturunan suku Jawa, Sumatera, Papua, Ambon, Sulawesi maupun Borneo semuanya menjadi satu dalam rumpun Indonesia. Ini membuktikan bahwa proses sejarah bangsa ini dibawah Pancasila tetap terjaga dengan baik. Jika dipaksakan untuk merubah ideology berbangsa dari Pancasila menjadi yang lainnya, tentu akan berdampak pada munculnya apa yang dinamakan ethno nasionalisme yang bersifat chauvinism (kedaerahan) sehingga Indonesia bubar. Kasus yang menimpa Uni Soviet menjadi tercerai berai dalam Negara-negara merdeka sendiri karena paham yang dibangun dihancurkan sendiri oleh para politisinya. Jika Indonesia tidak berhati-hati dengan suka bermain-main dengan gagasan ideology lain, apa yang terjadi di Uni Soviet tahun 1989 akan menimpa Indonesia Raya. Indonesia akan berubah dari Sabang sampai Merauke menjadi dari Jakarta sampai Banyuwangi saja bahkan mungkin lebih sempit lagi. Gagasan federasi yang pernah muncul pada masa menjelang reformasi mungkin saja akan menjadi kenyataan, sekalipun pada akhirnya kita terpuruk karena urusan dalam negeri yang semakin bertumpuk. Kasus Timor Timur adalah pelajaran yang sangat berharga untuk memikirkan bagaimana Indonesia akan dibangun ke masa depan. Indonesia akan dijadikan Negara yang semacam apa dan ideology macam apa menjadi penting dipertimbangkan.

Ideologi Murni Pancasila dengan begitu memiliki dua dimensi yang dapat membenarkan; yakni gagasan idealism dalam Pembukaan UUD 1945, yakni kemerdekaan, keadilan, dan kecerdasan serta praktek sejarah social yang telah mengujinya sehingga Pancasila bukanlah ideology kosong yang dirumuskan secara serampangan oleh para pendiri bangsa. Bahwa ada perdebatan semua itu tidak terhindarkan namun terbukti Pancasila memiliki daya rekat dan kohesivitas antar suku bangsa Indonesia. Pancasila sesungguhnya menjadi bagian penting dari sejarah bangsa ini, karena Pancasila dalam kadar tertentu telah menciptakan ruang dialog tentang kemajuan bangsa. Hanya dalam perjalanannya, Pancasila mendapatkan pembajakan dari kalangan elit politik tertentu yang hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya.

Sebagai ideology, Pancasila memiliki cita-cita universal yang hendak diperjuangkan, seperti telah disinggung yakni kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan kecerdasan bangsa. Hanya cita-cita universal ini seringkali kontradisi dengan perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Keadilan yang hendak diwujudkan ternyata berujung pada ketidakadilan. Kemerdekaan yang diharapkan banyak pihak ternyata berujung pada penghakiman oleh kelompok. Kecerdasan bangsa yang menjadi tumpuan membangun peradaban bangsa ternyata terkonsentrasi pada kelompok mempunyai saja. Kedaulatan yang diharapkan menjadi karakter bangsa ternyata terkoyak karena kepentingan segelintir orang dan lemahnya pemerintah dalam bargaining politik dengan Negara lain. Kasus Indonesia versus Malaysia, Indonesia versus Singapura dan Indonesia versus Australia adalah pertarungan kedaulatan bangsa yang diinjak-injak tetapi Negara tampak lemah dihadapan Negara lain.

Ketakutan Presiden RI untuk mendatangi Pengadilan Negeri Belanda pada bulan Oktober 2010 juga merupakan bukti bahwa harga diri bangsa ini seringkali dipertaruhkan hanya dengan hal-hal kecil yang tidak jelas apa maknanya. Negara hanya tampak kuat dihadapan rakyatnya sendiri, sehingga tampak sekali jika Indonesia sebenarnya merupakan "Negara lemah" atau malahan lebih tepat dikatakan

bahwa Indonesia kini adalah "Negara gagal" dan "Negara yang abai" dengan rakyatnya. Negara sibuk dengan agendanya sendiri sebagai bagian dari politik pencitraan yang menjadi landasan dalam memimpin bangsa, karena itu, sebenarnya sosok pemimpin bangsa di negeri ini benar-benar absen, karena yang muncul adalah pelbagai macam pencitraan-pencitraan bahwa Negara dalam kondisi krisis, terancam dan seterusnya sehingga kepala Negara sering diancam oleh warganya. Hal seperti ini tentu saja menggelisahkan banyak pihak. Negara mungkin tidak gelisah karena disitulah kekuatan hipnotis hendak dibangun oleh rezim kekuasaan. Namun akhirnya Pancasila sebagai landasan filosofis bernegara dan membangun bangsa hanya pepesan kosong yang senantiasa dipasung keberadaannya.

Oleh sebab itu, jika saat ini ada kelompok masyarakat yang berkeinginan merubah dasar negara yang secara resmi menjadi keputusan bersama sejatinya anak-anak bangsa tersebut dipastikan mendapatkan dorongan politik bukan Rahim Indonesia. Itulah ideologi politik yang datang dari negara lain. Ideologi politik dari tempat lain yang diimpor ke negeri ini namun dibungkus dengan gagasan keagamaan-keislaman dan universalitas. Jelaslah melawan kehendak para pendiri bangsa karena itu layak mendapatkan tentangan dan perlawanan serius. Organisasi yang berkehendak mengganti dasar negara adalah organisasi yang berkehendak membubarkan sendi-sendi kebangsaan dan keIndonesiaan karenanya tidak layak hidup di negeri ini apapun dalihnya. Kita jelas saat ini mendapatkan tantangan dari organisasi dan ideology transnasional yang berdialihkan keagamaan dan universalitas yang menganggap bahwa dasar negara Indonesia dan bentuk negara Indonesia bertentangan dengan agama tertentu. Akankah kita biarkan? Tidak boleh terjadi!

Prinsip Demokrasi Indonesia

Memerhatikan praktek ideology Pancasila yang seperti itu, perlu kita tengok kebelakang apakah ideology Pancasila sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip nilai demokrasi yang menjadi harapan banyak orang di muka bumi. Demokrasi yang oleh sebagian besar

ilmuwan politik dikatakan sebagai system politik terbaik diantara system politik modern yang ada di muka bumi. Demokrasi lebih baik dari totalitarianism karena demokrasi memberikan ruang pada masyarakat. Demokrasi lebih baik dari komunisme karena demokrasi memperhatikan keragaman struktur social yang ada di masyarakat. Demokrasi lebih baik ketimbang kapitalisme karena demokrasi menghendaki adanya pemihakan pada yang kecil. Dan seterusnya, demokrasi memiliki prinsip yang jauh lebih beradab dan manusia. Dari sana orang berharap pada berlakunya demokrasi sehingga dalam system politik modern demokrasi dipandang paling baik ketimbang system politik modern lainnya.

Jika diperhatikan beberapa prinsip yang terkandung dalam demokrasi seperti partisipasi aktif dan efektif warga Negara, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, tanggung jawab, keadilan, keterbukaan-inklusivisme, control dan keseimbangan maka demokrasi bisa dipastikan tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk dengan Islam sekalipun. Demokrasi bahkan menjadi bagian integral dari Pancasila. Pancasila menjadi bagian dari Islam bahkan merupakan jiwa dari Islam yang dirumuskan secara nasional KelIndonesiaan. Apakah Pancasila akan dirombak dengan yang lain, karena prinsipnya tidak ada yang bertentangan dengan agama Islam? Inilah yang pantas diajukan pada kelompok yang sampai saat ini masih mengagendakan Islam sebagai dasar Negara dan basis Ideologi Indonesia. Para ulama dan ahli telah sepakat bahwa nilai-nilai dari rumusan sila Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan Islam bahkan itulah bentuk aktualisasi Islam dalam ranah kebangsaan dan kelIndonesiaan.

Kita perhatikan prinsip partisipasi efektif dan aktif warga Negara dalam demokrasi. Efektif dan partisipasi warga Negara sudah seharusnya menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan yang strategis menyangkut hak dan kewajiban warga Negara. Hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dibahas secara bersama untuk menghasilkan keputusan yang mempertimbangkan banyak pihak. Memang hampir dapat dipastikan tidak ada satu keputusan menguntungkan semua pihak apalagi memuaskan, *win win solution*

agak sulit dalam praktek politik, namun sekurang-kurangnya akan memberikan pertimbangan atas suara dari partisipasi masyarakat sehingga masyarakat teribat dalam proses pengambilan kebijakan. Inilah yang merupakan kelebihan demokrasi dalam system politik modern dibandingkan dengan system politik lainnya. Mungkin mengecewakan sedikit orang tetapi memberikan kenyamanan pada banyak pihak karena terlibat dalam proses pembuatan kebijakan public dan kebijakan politik yang menyangkut banyak pihak. Dalam system politik totaliter yang terlibat dalam pengambilan kebijakan hanyalah kelompok penguasa, warga Negara diabaikan.

Dalam prakteknya memang partisipasi efektif dan aktif sebagai prinsip demokrasi di Indonesia masih perlu dipersoalkan, karena perhatian elit politik kita masih sangat kurang, sehingga kepentingan umum seringkali dilupakan bahkan sengaja dibuang jauh-jauh demi kepentingan kelompok dan pendukungnya. Oleh karena itu partisipasi efektif dan aktif warga Negara sudah seharusnya dilakukan sejak pembuatan agenda kebijakan, bukan hanya sekedar sharing pendapat dan setelah itu tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan karena dianggap akan merepotkan. Hal seperti ini semestinya dihindari karena akan menghilangkan prinsip dasar demokrasi, termasuk demokrasi Pancasila.

Partisipasi sangat penting diperhatikan sebab hal ini merupakan hal yang sangat krusial dalam demokrasi. Seringkali partisipasi hanya retorika belaka sementara prakteknya adalah kebijakan keputusan yang sangat tidak partisipasipatif maupun aspiratif. Disini diperlukan bentuk-bentuk partisipasi yang mendasar seperti partisipasi persuasive, bukan partisipasi koersif karena partisipasi koersif sebenarnya merupakan bentuk lain dari pemaksaan kehendak tetapi dengan cara dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi persuasive merupakan bentuk partisipasi yang memposisikan manusia sebagai manusia-manusia otonom (merdeka) yang sangat mungkin berbeda pemahaman, pandangan dan pendapat. Dari sharing pendapat dan pemahaman itulah kemudian dicari alternative pemahaman dan pendapat yang disepakati bersama sebagai bentuk aspirasi politik warga Negara.

Inilah yang dalam beberapa periode politik Indonesia tidak berjalan.

Prinsip demokrasi lainnya adalah adanya persamaan hak warga Negara. Persamaan hak dalam politik dan proses-proses demokrasi menjadi bagian sangat penting dalam demokrasi Pancasila. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk bagaimana warga Negara berada dalam persamaan hak, yakni satu suara menentukan suaranya sendiri. *One man one vote* adalah bentuk demokrasi persamaan hak politik warga Negara yang paling asasi. Apakah dia miskin, kaya, berpendidikan ataukah tidak memiliki hak politik yang sama dengan warga Negara lainnya. Hanya sayang dalam beberapa proses politik yang mempergunakan Pemilu sebagai mekanisme menentukan suara terbanyak dalam memilih kepala Negara atau kepala daerah, seringkali terlibat di dalamnya politik uang yang menghabiskan banyak biaya dan menelan prinsip demokrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Proses politik menggunakan suara mayoritas dalam beberapa aspek memang memberikan kesan tidak ada bedanya orang yang sadar politik dengan buta politik, sebab nilai suaranya sama dalam arti nominal. Suara politik masyarakat hanya dibedakan dengan kecerdasan pemilih sehingga memungkinkan adanya golongan putih (golput) atau oposisi partai. Dan sayangnya tradisi oposisi ini tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Oposisi partai seringkali identik dengan "pembangkangan" padahal sebagai bentuk control sangat diperlukan Negara.

Bahwa ada perbedaan karakter dan pemahaman antara orang miskin dengan orang kaya tidak terbantahkan. Ada perbedaan pendapat antara orang berpendidikan dengan tidak adalah sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Tetapi tidak berarti kaum terdidik dan berpunya memiliki hak politik istimewa dalam sebuah Negara. Hal yang membedakan adalah aturan yang dipakai bersama. Tentu tidak adil jika antara orang berpendidikan disamakan dengan yang tidak berpendidikan. Antara orang kaya dengan orang miskin. Antara orang dewasa dengan anak-anak, demikian seterusnya. Oleh sebab itu, aturan yang disepakati bersama itulah yang mengatur berlangsungnya proses demokrasi. Demokrasi dengan demikian sebuah system politik yang memiliki mekanisme dan aturan yang jelas sehingga Negara dan

warga Negara berada dalam koridor peradaban, bukan barbarian.

Persoalan hak politik dan keadilan hukum merupakan hal yang juga sangat krusial dalam demokrasi Pancasila, sebab hak politik seakan-akan menjadi hak warga Negara berpunya dan terdidik, sementara mereka yang miskin dan tidak terdidik terus menerus tertindas. Hal yang sama juga terjadi dalam hal keadilan hukum, warga Negara kaya dan terdidik seakan-akan mendapatkan hak hukum istimewa sementara yang miskin dan tidak terdidik menjadi sasaran tembak hukum positif. Disini tentu saja persoalan berat bagi para politisi yang masih memiliki hati nurani, dan hendak menjunjung tinggi politik yang bermartabat sebagaimana pernah dipraktikkan oleh para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa sekalipun berbeda pandangan, berbeda partai politik dan sikap politik, namun sangat menghargai perbedaan dan tetap bersahabat sebagai sesama bangsa Indonesia. Inilah yang sekarang ini nihil dalam praktek politik sebagian politisi dan birokrat Indonesia.

Prinsip lain yang penting adalah kebebasan berorganisasi (berserikat) dan berpendapat. Ini merupakan prinsip demokrasi yang universal. Sejak tahun 1999 memang tampak ada kebebasan warga Negara berorganisasi (berserikat) terutama dalam organisasi social keagamaan dan social politik. Sejak tahun 1999 tidak kurang 30 organisasi dari asosiasi-asosiasi dan perserikataan berdiri. Ormas keagamaan yang selama rezim orde baru tidak diperbolehkan berdiri kemudian merebak bak jamur dimusim penghujan. Sebut saja misalnya dalam Islam, kita akan menemukan FPI, MMI, Laskar Jihad, Ansharu tahuid, GPII, KAMII, KAMI, dan seterusnya. Sementara yang partai politik kita dapat menyebutkan HTI, dan sejumlah partai Islam lainnya seperti PKS, PKNU, PNU, PKU, PBB, PUI, PSII, PSI 1950, Masyumi Baru dan seterusnya sekali hanya dapat mengikuti sekali pemilu karena berdasarkan peraturan jika tak lolos batas minimal perolehan suara harus berhenti alias tidak mendapat dukungan masyarakat. Banyaknya partai politik dan organisasi social keagamaan yang berdiri dapat pula dikatakan sebagai bentuk multi varian aspirasi politik dan keagamaan Indonesia. Indonesia adalah pluralistic, tidak monolitik.

Namun kebebasan berorganisasi hanya tampak artificial, sebab ramai dalam hal mendirikan asosiasi dan partai tetapi minus visi dan agenda yang jelas tentang masa depan Indonesia. Dari sana terlihat ketika partai-partai tersebut turut bertarung dalam Pemilu ternyata tidak memiliki basis massa sementara sebagian dari elitnya mengatakan memiliki basis massa. Ternyata hanya klaim popularitas semata yang senyatanya tidak mendapatkan dukungan apapun kecuali segelintir orang. Kebebasan berorganisasi diterjemahkan sebagai kebebasan mendirikan partai politik minus agenda kebangsaan. Tentu saja hal ini menjadi beban tersendiri dalam Negara berdasarkan Pancasila. Mungkin suatu saat nanti sekalipun tidak harus dengan cara dipaksakan, ada aturan yang tegas tentang boleh tidaknya pendirian partai politik agar tidak hanya terkesan euphoria politik warga Negara yang telah sekian lama terpasung aspirasinya.

Sebagian lainnya mungkin pula menterjemahkan kebebasan berorganisasi adalah kebebasan untuk menjadi organisasi “kaki tangan” partai politik tertentu yang akan mendapatkan “nikmat” ketika partainya mendapatkan keberkahan dalam Pemilu. Ketika partai yang menjadi payungnya menang dalam Pemilu, sehingga organisasi kaki tangannya akan berpesta dalam kemenangan untuk mendapatkan jabatan di lingkaran kekuasaan. Inilah tafsir yang tampaknya berkembang luas ditengah kebebasan berorganisasi dan berserikat sehingga sangat banyak asosiasi dan organisasi sipil dan militer di Negara ini. Dengan demikian sangat krusial karena akan memangkas nilai luhur dari universalisme demokrasi termasuk demokrasi Pancasila.

Sementara dalam hal kebebasan berpendapat belakangan mengalami titik nadir, sehingga warga Negara sekalipun dikatakan memiliki kebebasan berpendapat, namun selalu diiringi dengan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Padahal dalam konteks akademik namanya pendapat senantiasa dilandasi dengan argument-argument atau alasan yang memadai sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan tanggung jawab seseorang yang mengemukakan pendapatnya. Pendapat yang hanya sambil lalu dan serampangan tidak masuk dalam kategori pendapat tetapi sekedar “omongan

ngawur” alias tidak berdasar yang tidak perlu ditanggapi karena tidak jelas apa tujuan dan maksudnya. Negara tidak perlu menanggapi berbagai macam “umpatan” dan cemoohan dari warga Negara yang sifatnya memang olok-olok, karena akan mengkerdikan Negara itu sendiri. Inilah yang mengkhawatirkan karena belakangan Negara ini dengan gampang sekali menanggapi omongan yang sifatnya isu belaka, tetapi dianggap serius sehingga masalah yang sebenarnya lebih penting direspons tidak menjadi perhatian.

Oleh sebab itu, jika sekarang pemerintah senantiasa mengemukakan bahwa pendapat warga Negara harus bebas bertanggung jawab merupakan bentuk ketakutan Negara atas warganya yang tidak bersedia dikontrol atas apa yang tengah dilakukan. Negara seringkali menyatakan bahwa Negara menjamin warga Negara untuk mengemukakan pendapatnya tetapi harus bertanggung jawab. Ini sebenar-benarnya sebagai bentuk lain dari control Negara atas warganya yang seringkali kritis atas kebijakan yang dibuat tetapi tidak sesuai dengan harapan banyak warga Negara yang hanya mempertimbangkan kepentingan pasar internasional, memperhatikan kepentingan partai dan hanya mempertimbangkan kepentingan sekelompok orang. Tetapi karena rezim kekuasaan demikian ketakutan maka akan merespons dengan berbagai cara termasuk mengancam dengan akan menuntut balik pendapat seseorang yang dianggap tidak bertanggung jawab. Bahkan dalam kasus penulisan buku, sampai sekarang pelarangan buku masih berlangsung di Indonesia, dan pelarangan buku paling banyak terjadi pada saat rezim reformasi dibawah presiden SBY. Ini tentu saja menyisakan pertanyaan serius, dimanakah yang dinamakan kebebasan berpendapat bisa dilakukan?

Dalam beberapa kasus bahkan Negara memang tidak boleh berlebihan menilai sebuah pertemuan yang dilakukan oleh organisasi keagamaan atau pun organisasi politik. Beberapa pertemuan yang dihadiri tokoh nasional di Jakarta tahun 2009, 2010, 2015 dan 2017 dianggap sebagai pertemuan yang mengagendakan terjadinya makar alias penggulingan kekuasaan. Hal ini hanya karena disana dibahas mengenai isu-isu yang sensitive terkait dengan beberapa kegagalan

Negara memberikan pelayanan public dan perlindungan pada warga Negara. Pertemuan beberapa hari lalu di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Jumat 8 Oktober yang dihadiri tokoh-tokoh seperti Jendral Purnawirawan Wiranto, Jusuf Kalla, Fuad Bawazier, Taufik Kiemas, Marzuki Alie, M. Din Syamsuddin dan beberapa lainnya ditanggapi demikian serius sebagai arena tokoh nasional untuk melakukan penggulingan kekuasaan. Hal ini jelas sekali berlebihan dan Negara menunjukkan posisinya benar-benar dalam keadaan ketakutan yang sangat tinggi, sehingga apapun pertemuan yang dilakukan jika mengkritis Negara dianggapnya makar.

Persoalan prinsip demokrasi lain adalah keadilan dan keterbukaan. Ini merupakan preseden yang sama buruknya dengan prinsip kebebasan berorganisasi dan berpendapat dalam rezim reformasi (jika kita setuju dengan istilah rezim reformasi). Keadilan yang didambakan banyak orang ternyata bermuara dan berhenti pada segelintir orang. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan pendidikan, keadilan kesehatan buat sebagian besar rakyat Indonesia adalah mimpi besar. Keadilan menjadi sangat mahal dan nyaris tidak terjangkau kalangan rakyat biasa, sementara untuk segelintir orang berpesta pora dalam gelimang kekayaan karena bebas mengkorup uang Negara. Sebagian orang bebas memanfaatkan segala fasilitas public atas nama tugas Negara dan amanat rakyat. Amanat Pancasila tentang menghargai hukum, menjunjung keadilan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat benar-benar terbelenggu oleh hasrat jahat para politisi dan birokrat bermental jahat dan kerasukan ruh iblis yang jahat.

Para tersangka pelbagai kasus korupsi, penggelapan uang, kejahatan berpolitik seringkali tetap berkeliaran dapat menikmati kebebasan yang sejatinya merampas kebebasan warga Negara kebanyakan. Tetapi karena memiliki banyak koneksi, memiliki banyak pembela hukum, memiliki banyak uang maka dengan santai tetap menikmati kebebasan di Negara yang hukumnya memang sangat lemah dihadapan para elit politik maupun elit ekonomi (pengusaha). Kongkalikong elit politik dengan elit ekonomi merupakan hal yang tidak terbantahkan di dalam praktek demokrasi di Indonesia.

Kita sebagai warga negara dan warga bangsa jelas tidak ingin melihat dan menyaksikan jika negara ini bubar. Bangsa ini harus tetap berlangsung sampai satu hari sebelum kiamat dengan pelbagai cara kita harus mempertahankan. Bahwa ada banyak masalah social-ekonomi, politik, hukum, budaya dan hubungan social memang tidak bisa kita tolak. Namun memperbaiki adanya kekurangan tersebut jauh lebih baik ketimbang membubarkan sebuah negara karena kepentingan ideology transnasional yang diagendakan oleh asing sekalipun atas nama agama tertentu. Kita tidak bisa serta merta menyalahkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sekarang ini sebab pemerintahan saat ini juga merupakan kelanjutan pemerintahan sebelumnya yang telah berjalan sejak tahun 1945. Soal hutang luar negeri misalnya telah ada sejak tahun 1946 pasca Indonesia diproklamirkan sebagai negara Merdeka. Kita tidak dapat mengatakan dengan semena-mena bangsa ini gagal pada era sekarang, sebab saat ini kita dapat menyaksikan dengan terang benderang bahwa pembangunan infrastruktur misalnya bisa kita saksikan bahwa saat ini cukup berkembang. Perbaikan harga bahan bangunan dan makanan pokok cukup stabil.

Itulah beberapa hal krusial di Indonesia yang mengancam demokrasi sebagai system politik, serta menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Dari sana kemudian muncul riak-riak kecil tentang alternative dasar Negara lain selain Pancasila dan demokrasi diganti dengan system politik lain karena dianggap demokrasi tidak lagi memenuhi syarat. Pertanyaannya, apakah yang akan diganti adalah dasar Negara dan system politiknya, ataukah praxis bernegaranya yang perlu mendapatkan perhatian serius sehingga bangsa ini tidak terpuruk terus-menerus sehingga menjadi keterpurukan yang sempurna. Inilah yang akan dibahas pada bagian akhir tulisan ini.

Partisipasi Politik Dasar Kebangsaan

Sebuah bangsa merupakan suatu karakter yang tersusun karena adanya persatuan nasib, karakteristik, perilaku dan nilai yang menjadi jati dirinya. Oleh sebab itu, antara satu bangsa dengan bangsa

lain cenderung berbeda karena nasib yang berbeda dan nilai yang juga berbeda. Inilah yang menjadi unsure penting dalam sebuah bangsa. Termasuk bangsa Indonesia, yang telah berjalan beberapa tahun lamanya. Buya Syafii Maarif memiliki pendapat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masih muda, jika sejak tahun 1908 maka belum lebih dari 120 tahun. Sementara jika sejak kemerdekaan 1945 maka baru berusia 73 tahun. Oleh sebab itulah memang Indonesia merupakan bangsa yang masih muda. Bangsa ini masih muda dalam usia kemerdekaan namun cukup banyak mendapatkan tantang social politik dan kebangsaan.

Sebagai bangsa yang masih muda, Indonesia sebenarnya memiliki dasar kebangsaan yang kuat yakni Pancasila yang prinsipnya terdiri dari keimanan bangsa sebagai bentuk lain dari ketaqwaan kepada Tuhan. *Pertama*, ketaqwaan pada Tuhan tentu saja prinsip yang sangat otonom karena itu tidak boleh ada pemaksaan dalam hal ketaqwaan bangsa Indonesia. Apalagi memaksakan harus memiliki keimanan yang sama dalam hal menganut agama dan paham keagamaan. Kebebasan beragama adalah prinsipnya. Dalam kebebasan beragama orang tidak boleh dipaksakan harus menganut agama ini atau itu, bahkan harus menganut paham ini atau itu, namun yang sekarang terjadi di Indonesia adalah adanya sekelompok umat beragama yang seringkali memaksakan paham keagamaannya menjadi paham seluruh warga Negara sehingga menjadi paham dominan dan tiranik. Bangsa yang berTuhan ini adalah bangsa yang beradab dan berkebudayaan oleh sebab itu harus memiliki perspektif yang inklusif dan toleran atas adanya keragaman agama dan keyakinan pada Tuhan Sang Pencipta. Tidak dapat memaksakan satu bentuk keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan dalam banyak nama dan ekspresi itulah sejatinya.

Kedua, prinsip keadilan yang merupakan landasan kebangsaan paling krusial, sebab keadilan hanya sering terjadi dalam retorika politik, bukan praksis kehidupan. Seperti sudah diuraikan dibagian awal bahwa keadilan masih berpihak pada yang mempunyai dan berpendidikan. Sementara yang miskin dan bodoh tidak mendapatkan keadilan. Inilah celaknya di Indonesia yang memiliki prinsip keadilan

tetapi minus pelaksanaan. Dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara tidak boleh ada monopoli kebenaran dan penguasaan ekonomi sebab akan menimbulkan konflik kekerasan yang berbahaya bagi bangsa ini. Bangsa ini akan tercerai-berai karena persoalan keyakinan-kebenaran dan persoalan ketidakadilan ekonomi yang monopolistic. Oleh sebab itu, kebenaran tidak boleh dimonopoli oleh satu kelompok agama dan etnis tertentu. Demikian pula dengan keadilan ekonomi tidak boleh terjadi pada satu etnis tertentu sebab berbahaya bagi Indonesia.

Ketiga, prinsip keadaban (keberadaban). Prinsip ini mestinya menjadi prinsip berbangsa yang kuat sehingga dalam setiap irama kehidupan dilandaskan pada keadaban. Keadaban adalah sebuah prinsip yang bersedia menghargai perbedaan, menghargai keragaman, menghargai dan menghormati lain serta menjadi etika sebagai prinsip dalam berpolitik dan kehidupan sehari-hari. Dialog dan saling percaya menjadilah yang terus menerus dikembangkan dalam bermasyarakat. Bukan kekerasan dan koersi-koersi yang diutamakan dalam menentukan sebuah kebijakan. Keadaban karena itu harus dijunjung tinggi dan diparkatekkan sehingga berbangsa memiliki martabat. Menjunjung tinggi kemanusiaan dan martabat anak-anak bangsa adalah amanat Pancasila dan sekaligus amanat agama kepada seluruh pemeluknya. Jika saat ini terdapat sekelompok orang yang tidak bersedia menghargai martabat dan harkat manusia dengan menebarkan kebencian, permusuhan dan penghukuman sejatinya bertentangan dengan ajaran agama yang paling asasi.

Keempat, kesejahteraan. Inilah prinsip dasar kebangsaan yang sampai sekarang juga sangat tidak layak dikemukakan. Sebab kesejahteraan untuk semua warga Negara ternyata berhenti menjadi kesejahteraan segelintir orang yang dekat dengan lingkungan kekuasaan alias *inner cycle* kekuasaan dan *the rulling elite* bukan masyarakat warga yang jumlah demikian banyak. Kita dapat menyaksikan betapa kesenjangan antara warga Negara kebanyakan dengan elit kekuasaan dalam hal kesejahteraan hidup. Betapa sulitnya saat ini masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang memadai, tetapi segelintir orang dengan mudah mengeruk kekayaan

Negara lewat pelbagai macam manipulasi dan penggelapan pajak dan mark-up belanja Negara.

Kelima, kebebasan. Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa kebebasan yang menjadi dasar kebangsaan ternyata masih sebatas kebebasan retorika politik bukan kebebasan asasi warga Negara sehingga yang terjadi adalah “kebebasan bertanggung jawab” alias kebebasan yang terpasung. Rezim kekuasaan sangat ketakutan dengan kritik dan control warga Negara sehingga kritik dan control Negara diartikan sebagai bentuk lain dari makar dan provokasi yang harus diwaspadai ekstra kuat sekalipun tidak diberlakukan hukuman subversif. Namun yang terjadi sebenarnya adalah murni “kebebasan yang terpasung” oleh rezim politik yang mendekati otoriter bukan demokrasi. Kita berada pada titik nadir demokrasi yang lebih menekankan ada apa yang kita namakan procedural demokrasi, bukan substansial demokrasi. Tanda procedural demokrasi adalah pemilu berlangsung secara rutin, tetapi substansi pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, tak terwujud sama sekali, dibuktikan dengan politik uang yang menggilai.

Penutup

Bung Karno adalah salah satu sosok pemimpin bangsa ini yang telah memberikan kontribusi sangat besar sejak menjelang pendirian Republik sampai akhir hayatnya. Komitmen kebangsaannya tidak perlu diragukan sekalipun terdapat kontroversial dalam beberapa pemikiran dan perilaku manusiawinya. Namun keberanannya sebagai seorang nasionalis tidak bisa dipandang remeh oleh semua pihak. Gagasannya tentang nasionalisme telah mengilhami para pendiri bangsa ini dan penerusnya. Gagasannya tentang kebangkitan bangsa asia dengan Ganefo (kekuatan asia baru di muka bumi) merupakan pembelaan atas bangsa bangsa Asia yang terjajah. Semangatnya untuk mandiri secara ekonomi ditunjukkan dengan pembelaannya terhadap ekonomi rakyat yang dirumuskan dalam sosialisme kerakyatan. Semangatnya untuk dekat dengan rakyatnya dinyatakan dalam kesederhanaan seorang pemimpin Bangsa yang menjadi Penyambung

Lidah Rakyat.

Bung Karno memberikan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pelbagai ungkapan yang membakar semangat kaum muda, kaum Marhaenis, dan Islamisme. Tetapi seringkali semangat Nasionalisme, Marhaenisme dan islamisme Bung Karno disalah tafsirkan oleh lawan-lawan politiknya sehingga terjadi pembelotan dan bahkan pemberontakan pasukan pengawal yang dahulu dibentuknya sendiri Cakrabirawa. Bung Karno telah tiada. Bung Karno telah meninggalkan kita semua dari muka bumi Indonesia, tetapi spiritnya untuk Merdeka, Kemajuan, dan KelIndonesiaan tidak pernah luntur diserang zaman. Disitulah kita membutuhkan pemimpin yang bersedia memberikan tauladan pada rakyatnya dengan kesederhanaan. Kita membutuhkan pemimpin dengan keberanian melakukan perlawanan jika tidak sepaham. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup berdialog dengan zaman. Kita juga membutuhkan pemimpin yang sanggup mempersatukan perbedaan yang demikian tajam. Bung Karno jelas memiliki itu semua. Sementara sekarang kita memiliki penguasa tetapi minus pemimpin!

Beberapa catatan dalam tulisan ini akhirnya berkesimpulan bahwa gagasan Bung Karno serta para pendiri bangsa lainnya tentang Pancasila sebagai dasar kebangsaan dan KelIndonesiaan sebenarnya memiliki relevansi tinggi, hanya saja dalam prakteknya seringkali tidak sebanding dengan norma dan retorika yang disampaikan pada publik. Bangsa ini yang telah menjadikan Pancasila sebagai ideology murni karena perjalanan sejarah yang panjang dan melelahkan telah membuktikan bahwa Pancasila sebenarnya sebagai karakteristik bangsa ini sangat memenuhi syarat. Hanya saja praktek politik yang berlangsung seringkali memberikan kerangkeng dan melakukan koersi-koersi atas nama Pancasila itu sendiri. Dalam Negara Pancasila, hubungan antara agama dan Negara tampak tidak terlalu bermasalah, jika memperhatikan tidak adanya larangan penganut agama menjalankan perintah agamanya, bahkan mendirikan organisasi-organisasi keagamaan pun tidak ada larangan. Itu semua sebenarnya berkah bagi bangsa ini yang berdasarkan Pancasila, sehingga partisipasi politik warga Negara, dalam perspektif sosiologi politik bisa

berjalan. Pertanyaannya, apakah kita akan mengganti Pancasila dengan dasar kebangsaan yang lain, ataukah yang harus kita kerjakan adalah kita merevitalisasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kebangsaan? Itulah perenungan kita tentang keIndonesiaan dan kebangsaan kita saat ini.

Jakarta, 30 Juni 2018

MERENUNGGAN KEMBALI PANCASILA DAN KEINDONESIAAN KITA

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography

Off